

Pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai oleh DPD Partai Golkar Sumatera Barat

Fintarisa Lubis, Al Rafni, Suryanef, Hasrul,

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Al Rafni**

E-mail: alrafni@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kader Partai oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar Periode 2020-2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan metode. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah daerah provinsi yang merupakan turunan dari musyawarah nasional yang kemudian dijalankan oleh bidang kaderisasi dan keanggotaan. Pendidikan politik dilakukan paling tidak satu kali dalam setahun tetapi bisa lebih itu tergantung program yang diamanahkan dalam musyawarah daerah, budget, kebutuhan partai saat itu. Sedangkan hambatan yang dihadapi, yaitu keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang terbatas, komunikasi yang tidak terjalin antar pengurus, kurangnya keseriusan kader, dan tidak ada inovasi baru. Dari berbagai hambatan yang ada DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar sudah menyiapkan solusi-solusi yang ampuh dan secara praktis dan kondusif untuk kader partai dapat melaksanakan pendidikan politik.

Kata Kunci: partai politik, pendidikan politik, Partai Golkar

ABSTRACT

This research aims to describe the implementation of political education for party cadres by the Golkar Party DPD, West Sumatra Province for the 2020-2025 period. This type of research is qualitative research using descriptive methods. The selection of informants was carried out using Purposive Sampling technique. The types of data are primary data and secondary data collected through interviews and documentation studies. Testing the validity of the data was carried out by triangulating sources and methods. The data analysis used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this research show that the implementation of political education by the West Sumatra Province Golkar Party DPD was carried out based on the results of provincial regional deliberations which were derivatives of national deliberations which were then carried out by the cadre and membership sector. Political education is carried out at least once a year but can be more depending on the program

mandated in regional deliberations, the budget, and the needs of the party at that time. Meanwhile, the obstacles faced are limited funds, limited facilities and infrastructure, lack of communication between administrators, lack of seriousness from cadres, and no new innovations. By the various obstacles that exist, the West Sumatra Province Golkar Party DPD has prepared solutions that are effective and practical and conducive for party cadres to carry out political education.

Keywords: political parties, political education, Golkar Party



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, partai politik berperan sebagai landasan sistem demokrasi negara. Budiardjo (2000:161) mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil. Partai politik memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada anggota mereka dan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut Pasal 11 ayat (1) huruf (a), partai politik berfungsi sebagai sarana untuk mendidik anggota dan masyarakat umum tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pendidikan politik adalah upaya untuk membentuk orang menjadi partisipan politik yang bertanggung jawab. Pendidikan politik juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa "Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara". Partai Golkar sebagai salah satu partai besar yang ada di Indonesia memiliki basis kader dan simpatisan yang cukup banyak. Kader-kader tersebut tersebar hingga tingkat desa dan menjadi salah satu bagian dari sistem politik di Indonesia. Dengan peran kader Partai Golkar ini seharusnya memberikan contoh kepada partai-partai lain dalam melaksanakan pendidikan politik yang baik dan benar sehingga mampu meningkatkan pemahaman politik masyarakat mengenai politik.

Namun dalam realitasnya pelaksanaan tersebut hanya bersifat momentum saja atau hanya pada momen tertentu saja seperti Pemilu atau adanya Pilkada, dengan kata lain pemberian pendidikan politik hanya bertujuan untuk memperoleh suara bagi partai dan calon saja tanpa ada follow up lebih lanjut. Selain itu perilaku dan sikap berbagai partai politik terkesan sudah tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Padahal semestinya kader partai sebagai pemangku jabatan dalam partai politik harus mengutamakan

pendidikan politik agar meningkatkan pengetahuan mengenai politik ke masyarakat. Sebab pendidikan politik yang dilakukan oleh partai tidak hanya untuk memberantas minimnya minat masyarakat tentang perkembangan politik dalam negeri, tapi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai guna menuntut para kader partai untuk memiliki kompetensi berkualitas yang mampu berkomunikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya suatu program pendidikan politik yang sebelumnya telah terprogram, mulai dari waktu pelaksanaan program pendidikan politik, kurikulum pendidikan politik, metode pendidikan politik sampai pada evaluasi pendidikan politik tersebut.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah Saputro (2015) yang berjudul Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014). Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa peran Partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat masih cukup rendah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa materi dan pendekatan yang digunakan dalam pendidikan politik masih sangat konseptual dan kurang praktis. Hal tersebut menyebabkan rendahnya kualitas kader partai yang rendah, tentunya berdampak pada partisipasi politik masyarakat yang rendah pula dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan publik. Berdasarkan adanya beberapa permasalahan terkait pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kader Partai Oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2025.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar Periode 2020-2025 secara mendalam. Lokasi penelitian ini dilakukan di DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder dari penelitian ini adalah arsip dan data-data tertulis lainnya yang didapatkan dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menguji kredibilitas penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, memanfaatkan penggunaan sumber dan metode. Teknik analisis data dalam

penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kader Partai oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar Periode 2020-2025

Semua partai politik diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik guna menghasilkan kader-kader yang berkompeten yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan loyalitas serta diharapkan mampu berfungsi dengan baik di tengah konflik politik. Pengetahuan tentang politik dan ideologi partai adalah dua unsur utama yang harus dipahami oleh setiap kader partai. Kader partai adalah orang-orang yang telah dididik dan dipersiapkan dalam berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, memungkinkan mereka bekerja lebih baik daripada orang biasa.

Setiap partai politik merasa bahwa cara terpenting untuk meningkatkan kualitas partai di daerah adalah dengan meningkatkan kualitas kadernya. Pendidikan politik dirancang untuk meningkatkan pemahaman ideologis, kesadaran berorganisasi, dan kepedulian terhadap lingkungan guna mencapai tujuan bersama. Tentunya dimaksudkan agar masing-masing kader partai akan terlibat dalam pertarungan ideologis untuk melindungi diri dari praktik pragmatism politik dan aspek kehidupan lainnya. Pendidikan politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik yang diberikan kepada kader atau anggota partai dan pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 11 ayat (1) mengatur ketentuan dari fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

R. Hager mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik (dalam Kartono, 1989: 14). Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat pendidikan politik orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*), disamping usaha demokratisasi struktur kemasyarakatannya.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai tidak hanya untuk memberantas minimnya minat masyarakat tentang perkembangan politik dalam negeri, tapi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai guna menuntut para kader partai untuk memiliki kompetensi

berkualitas yang mampu berkomunikasi kepada masyarakat. Pendidikan politik memiliki tiga tujuan, yakni membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar yaitu pendidikan politik terhadap anggota atau kader partai dan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan politik menjadi tanggung jawab partai politik untuk secara khusus meningkatkan kualitas kader partainya dan secara umum meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pendidikan politik sendiri sudah dilakukan beberapa kali di DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar dengan tujuan agar kader partai menyadari haknya dalam berpolitik dan mendapatkan pendidikan. Kemudian, pendidikan politik dilaksanakan agar kader partai dapat bertanggung jawab dalam menjadi kader yang baik.

Pelaksanaan pendidikan politik bagi kader Partai Golkar Provinsi Sumbar dapat dilihat dari program kerja yang ditetapkan DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar yaitu pendidikan politik untuk perempuan, pendidikan politik fungsionaris/caleg, pendidikan politik karakterdes, pendidikan politik konsolidasi organisasi dan juga pendidikan politik untuk masyarakat. Kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar untuk menghadapi pemilu 2024. Untuk bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilakukan ada yang berupa diskusi, worksop, seminar, sosialisasi, bimtek, dan ada juga berupa diskusi dalam kelompok kecil. Sedangkan materi yang disampaikan yaitu mengenai ke Golkar, idealis bentuk kepemimpinan, organisasi, ideologi/sejarah tentang ke Indonesia, dan yang terakhir materi bersifat umum. Serta dalam pelaksanaannya pendidikan politik dilakukan paling tidak 1 kali dalam setahun tetapi bisa lebih tergantung program yang diamankan dalam musyawarah daerah, budget, kebutuhan partai saat itu.

Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kader Partai oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar Periode 2020-2025

Proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini karena terdapat hambatan-hambatan sehingga membuat hasilnya kurang maksimal. Menurut Oemar (1992:72), Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut salah satu hambatan yang dirasakan pihak DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar dalam pelaksanaan pendidikan politik seperti adanya keterbatasan dana untuk melakukan

program pendidikan politik, dikarenakan minimnya biaya dari bantuan pemerintah untuk partai politik hal ini tentunya berpengaruh terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh partai. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal tersebut berasal dari masing-masing individu. Sedangkan faktor eksternal dari luar. Hal diatas sangat relevan dengan penelitian ini, hambatan yang dirasakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar dalam pelaksanaan program pendidikan politik bagi kader partai antara lain adanya keterbatasan dana untuk melakukan program pendidikan politik, dikarenakan minimnya biaya dari bantuan pemerintah untuk partai politik hal ini tentunya berpengaruh terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh partai. Jika dana yang dimiliki sedikit maka program tidak bisa dilakukan dengan maksimal dan tidak bisa dilakukan berulang-ulang karena keterbatasan tersebut.

Hambatan yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik. DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar sampai saat ini belum memiliki tempat yang representatif bagi pelaksanaan pendidikan politik dan kurangnya sarana pendukung lainnya seperti media elektronik yang seringkali dipergunakan sebagai media pembelajaran dalam pendidikan politik. Hambatan yang ketiga, adanya komunikasi yang tidak terjalin antara pengurus partai yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pengurus yang tidak aktif hal ini menyebabkan pelaksanaan program pendidikan politik sulit dijalankan.

Hambatan yang keempat, kurangnya keseriusan kader dalam pelaksanaan pendidikan politik, karena tidak semua kader siap untuk mengikuti program pendidikan politik yang merupakan pendidikan formal yang membutuhkan kesiapan baik fisik maupun mental. Hambatan yang kelima, tidak ada inovasi baru dalam pelaksanaan pendidikan politik, pendidikan politik terhadap kader bersifat baku, artinya apa yang diberikan DPP Pusat Partai Golkar hal itu juga yang diberikan kebawah yaitu DPD yang tidak boleh lepas dari AD dan ART partai sehingga tidak ada kemajuan dalam pelaksanaannya.

Solusi dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kader Partai oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar Periode 2020-2025

DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar sudah menyiapkan solusi-solusi yang ampuh dan secara praktis dan kondusif untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pendidikan politik bagi kader partai. Solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. (Munif Chatib: 2011) solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa

adanya tekanan. Maksud adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan solusi dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada. Jika tidak demikian maka solusi yang didapat akan sangat subjektif sehingga dikhawatirkan bukan merupakan solusi terbaik. Untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama kita perlu mengenali apa sebenarnya masalah yang terjadi. Kemudian kita cari fakta atau bukti mengenai permasalahan tersebut. Setelah itu kita telaah apa yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut. Setelah jelas masalah beserta latar belakangnya barulah kita dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut pada penelitian ini, solusi dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar terhadap berbagai hambatan yang dirasakan ketika proses pendidikan politik berlangsung yaitu solusi untuk keterbatasan dana yang diberikan yaitu adanya sumbangan atau patungan dari kader-kader yang telah berhasil duduk di bangku eksekutif maupun legislatif agar kegiatan tetap berjalan dengan lancar. Kemudian solusi untuk kurangnya sarana dan prasarana yaitu dengan menyewa tempat maupun alat elektronik agar terselenggaranya kegiatan dengan lancar. Ketiga solusi untuk kurangnya komunikasi antar pengurus yaitu dengan diadakannya konsolidasi agar memperkuat sekaligus memberikan motivasi dan pengarahan bagi pelaksanaan partai ke depan.

Solusi keempat untuk kurangnya keseriusan kader bagi para kader yang tidak bisa mengikuti kegiatan program pendidikan politik maka partai akan melakukan *coaching* artinya sebuah metode pelatihan di mana seseorang yang lebih berpengalaman atau terampil memberikan nasehat kepada kader agar apa yang disampaikan pada saat pendidikan bisa disampaikan kembali kepada para kader yang tidak hadir saat itu. Solusi terakhir untuk kurangnya inovasi baru dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu melakukan bentuk terobosan baru contohnya bukan hanya melakukan ceramah saja tetapi partai melakukan dalam bentuk webinar dengan mengundang tokoh-tokoh nasional dalam pelaksanaan pendidikan politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pendidikan Politik DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar dilakukan dalam berbagai kegiatan yang ada sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar untuk menghadapi pemilu 2024. Pendidikan politik dilakukan paling tidak satu kali dalam setahun tetapi bisa lebih itu tergantung program yang diamanahkan dalam musyawarah daerah, budget, kebutuhan partai

saat itu. Dalam Pelaksanaan pendidikan politik tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat berbagai hambatan yaitu, adanya keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang terbatas, komunikasi yang tidak terjalin antar pengurus, kurangnya keseriusan kader, tidak ada inovasi baru dalam pelaksanaan pendidikan politik. Dari berbagai hambatan yang ada DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar sudah menyiapkan solusi-solusi yang ampuh dan secara praktis dan kondusif untuk kader partai dapat melaksanakan pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I. A. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal (Study Kasus di Partai Keadilan Sejahtera). *Journal of Education Sciences*, 1(1), 27–38.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gusmansyah, W. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(2), 177. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2831> .
- Masriyani, M., & Yanti, H. (2019). Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 97. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.50>
- Rara Suryani (2022), Program Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020 (Studi Pada DPD PAN Dan DPC Gerindra Di Nagari Talang Kabupaten Solok). *Journal of Education, Cultural and Politics* Volume 2 No 1.
- Septiawan, I. (2017). *Educitizen* , Vol. 2 No. 1 Mei 2017 118. 2(1), 118–129.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Geupedia.
- Syafiie, Inu Kencana. (2009). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Tarsidi, D. Z. (2018). Berfungsikah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik. *Jurnal Pendidikan*, 2(1), 2580–0086. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2818362%5C&val=25186%5C&title=Berfungsikah> Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia. *Sasi*, 27(4), 475. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.563>